

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Bank Syariah adalah khas Indonesia yang tidak dijumpai di Negara lain, lembaga ini disebut “Bank Islam” (*Islamic Bank*). Di Indonesia, term Bank Islam telah mengalami kontekstualisasi sehingga muncul nama Bank Syariah. Hal ini terkait dengan tradisi menegakkan syariat seperti yang diisyaratkan dalam naskah Piagam Jakarta. Dilihat dari dimensi peraturan perundang-undangan, penamaan Bank Syariah adalah wujud dari sikap taat asas, yaitu bahwa secara teknis yuridis, undang-undang menyebut bank yang operasinya berdasarkan prinsip syariah dengan, “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*loss and profit sharing*). Istilah ini kemudian direvisi sehingga menjadi “bank berdasarkan prinsip syariah”. Belakangan bank ini disebut “Bank Syariah” karena berpedoman kepada ketentuan syariah Islam.¹

Di Indonesia bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang, bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah telah bertambah menjadi 20 unit,

¹ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, Cet ke-1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) hlm 40.

yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.²

Dalam usahanya Bank Syariah memberikan penyaluran dana atau pembiayaan bagi para nasabahnya. Pembiayaan menurut definisi UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah usaha perbankan dalam menyediakan uang atau “tagihan yang dipersamakan dengan itu” kepada nasabahnya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai (nasabah) mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Tujuan dari pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariahnya adalah peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi nasabah/pihak yang dibiayai. Pembiayaan ini dalam bank konvensional disebut kredit perbankan dengan penetapan bunga.³

Penyaluran berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan

² Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet ke-9 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013), hlm 25.

³ Muhammad Syamsudin, *Macam-macam Pembiayaan pada Bank Syariah*, <http://www.nu.or.id/post/read/85247/macam-macam-pembiayaan-pada-perbankan-syariah>, (diakses 1 Mei 2019)

pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijra wa iqtina*).⁴

Persaingan antar Bank Syariah menuntut bank selaku pelaku bisnis untuk lebih kreatif dan inovatif menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan trend nasabah. Permintaan nasabah terhadap emas untuk kebutuhan lindung nilai cukup tinggi, motif ini disebabkan karena keinginan keuntungan dalam lindung nilai terhadap aset karena kontinuitas kenaikan harga emas untuk jangka panjang. BRIS menangkap peluang bisnis ini dengan meluncurkan produk KLM (Kepemilikan Logam Mulia), dengan memfasilitasi kebutuhan nasabah akan emas melalui skema pinjaman *Qardh* dengan pembayaran secara angsuran sekaligus jasa pemeliharaan emas akibat emas yang dijaminkan. Diharapkan pada saat pinjamannya lunas, maka harga emas secara jangka panjang akan naik.⁵

⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Terass, 2014), hlm 2-3.

⁵ Keuangan/Bank, *Ini Skema Emas BRI Syariah yang Diduga Merugikan*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-skema-emas-bri-syariah-yang-diduga-merugikan>, (diakses 2 Mei 2019)

Pembiayaan Kepemilikan Emas sama dengan Fatwa Dewan Syariah No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara tidak Tunai menyatakan bahwa *"Hukum jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)"*. Dan jual beli Emas secara tidak tunai dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*)
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka dua (2) tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.⁶

Berbeda dengan kebanyakan Bank Umum Syariah (BUS) yang menggunakan akad *murabahah* dalam pelaksanaan dari produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM), Bank BRISyariah justru menggunakan akad *qardh* dan *ijarah* dalam pelaksanaan dari produk pembiayaan tersebut.

Obyek dari pembiayaan ini merupakan emas, dimana emas merupakan salah satu barang ribawi dimana penyerahannya harus secara langsung atau tunai pada saat

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual beli Emas tidak Tunai.

transaksi. Bila hal tersebut tidak dipenuhi maka akan menimbulkan *riba nasia'ah*. Namun berdasarkan Fatwa No 77/DSN MUI/V/2010 mengatakan bahwa “emas yang dibeli secara tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Dalam syarat dan ketentuan pelaksanaan pembiayaan logam mulia di Bank BRI Syariah Cabang Suniarja Bandung pada saat emas disimpan atau ditunda penyerahannya selama dana *qardh* belum dilunasi tidak ada akad yang mendukung dari penundaan penyerahan emas tersebut, hanya ada dua akad saja yang disebutkan yaitu *qardh* dan *ijarah*.

Bank BRI Syariah menggunakan akad *ijarah* dalam proses penyimpanan dan pemeliharaan emas, dimana nasabah dikenakan *ujrah* atau *fee* atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas, sedangkan dalam SEBI/14/16/Dpbs/2012 Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank dan Unit Usaha Syariah mengatakan “Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE (Pembiayaan Kepilikan Emas)”. Dan lagi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Suniaraja Bandung menentukan *ujrah* berdasarkan dana *qardh* yang diberikan kepada nasabah untuk pembiayaan kepemilikan emas. Dari latar belakang masalah diatas maka penulis memutuskan untuk mengambil judul penelitian yaitu : “Aplikasi Akad *Qardh* Dan *Ijarah* pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Suniaraja Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Salah satu produk yang terdapat dalam bank syariah adalah pembiayaan (*financing*). Dalam produk pembiayaan logam mulia akad yang digunakan biasanya adalah akad *murabahah*. Namun berbeda dengan yang terdapat dalam produk pembiayaan logam mulia di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Suniarja Bandung, dimana akad yang digunakan adalah akad *qard* dan *ijarah*.

Dengan rumusan masalah tersebut penulis membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas, diantaranya yaitu:

1. Apa latar belakang penggunaan akad *qard* dan *ijarah* pada produk Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di Bank BRI Syariah Cabang Suniaraja Bandung?
2. Bagaimana aplikasi akad *qardh* dan *ijarah* dalam produk Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di Bank BRI Syariah Cabang Suniaraja Bandung?
3. Bagaiman kesesuaian akad *qardh* dan *ijarah* dalam kepemilikan emas secara tidak tunai dengan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara tidak Tunai dan SEBI/14/16/Dpbs/2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank dan Unit Usaha Syariah terhadap produk Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KLM)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang penggunaan akad *qard* dan *ijarah* pada produk Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di Bank BRI Syariah Cabang Suniaraja Bandung.
2. Untuk mengetahui aplikasi akad *qardh* dan *ijarah* dalam produk Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di Bank BRI Syariah Cabang Suniaraja Bandung.
3. Untuk mengetahui kesesuaian akad *qardh* dan *ijarah* dalam jual beli mas secara tidak tunai dengan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara tidak Tunai dan SEBI/14/16/Dpbs/2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank dan Unit Usaha Syariah terhadap produk Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KLM).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dalam penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan masyarakat dalam mengetahui akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah khususnya dalam produk pembiayaan

2. Kegunan Praktis

a. Untuk Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas proposal dalam rangka memenuhi syarat kelulusan.

b. Untuk Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi saran ataupun pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan produk yang berkaitan.

E. Studi Terdahulu

Beberapa skripsi terdahulu yang telah penulis tinjau yang juga memiliki pembahasan mengenai pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KLM) diantaranya yaitu *Pertama*, skripsi dari Eka Yuliana (2013) dengan judul “*Pelaksanaa Multi Akad dalam Produk Kepemilikan Logam Mulia di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung*”, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa akad-akad yang digunakan dalam produk Kepemilikan Logam Mulia yaitu akad *murabahah bil wakalah*, *rahn*, dan *qardh* yang dilakukan dalam satu transaksi secara bersamaan, ini termasuk kedalam transaksi yang dilarang karena adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) antara pihak bank kepada nasabah tentang akad mana yang akan digunakan. Sementara nasabah tidak mengetahui dengan pasti akad-akad tersebut, serta adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu nasabah karena haknya yaitu emas tidak langsung diberikan

yang mana pihak bank sudah menerima uang cicilan dari nasabah. Dan multi akad yang digunakan diharamkan karena telah menyatukan akad jual beli dengan akad *qardh* dalam satu transaksi yang dapat menjatuhkan pada *riba*.⁷

Kedua, yaitu skripsi yang ditulis oleh Rini Astriani (2013) yang berjudul “Pelaksanaan Akad Murabahah bil Wakalah dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Batangan di BRISyariah Cabang Bandung.” Kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan pembiayaan kepemilikan emas di BRISyariah Cabang Bandung dilatarbelakangi oleh trend saat ini dalam berinvestasi emas yang cukup menguntungkan karena emas memiliki sifat yang sangat *likuid*, mekanisme pembiayaan diawali dari pengajuan atau permintaan nasabah dan penawaran oleh para pihak, pemberitahuan harga jual dan harga beli oleh pihak bank kepada pemesan. Ditinjau dari *fiqh muamalah* bahwa yang terjadi di Bank BRISyariah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep jual-beli emas secara syariah. Hal ini disebabkan emas merupakan salah satu harta ribawi yang dimana dalam jual-belinya diharuskan tunai dan diserahkan pada saat akad, yang mana apabila hal tersebut tidak dipenuhi akan menimbulkan *riba bai’*. Pada praktik transaksi *murabahah bil wakalah*

⁷ Eka Yuliana: *Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Kepemilikan Logam Mulia di BRI Syariah Kantor Cabang Buah Batu*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013)

yang terjadi di bank BRISyariah ini identik dengan *bai' ma laisa indak* dan tidak sah transaksinya secara Syariah.⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Pitriya Ulpah (2018) yang berjudul “*Tinjaun Yuridis Normatif Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan Akad Murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Bandung.*” Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pembiayaan Kepemilikan Emas dengan akad *murabahah* di BJB Syariah Kantor Pusat Bandung yaitu sama dengan akad *murabahah* pada pembiayaan umumnya, namun pada pembiyaan ini ada pembebanan biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang digunakan sebagai agunan dan ditanggung oleh nasabah, hal tersebut tidak sesuai dengan SEBI No. 14/16/DPbs perihal PKE dan Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.⁹

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan kajian terdahulu

No	Judul Sekripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Pelaksanaa Multi Akad dalam Produk Kepemilikan Logam	Membahasa mengenai Produk Pembiayaan Kepemilikan Logam	Berbeda lokasi penelitian, serta akad yang digunakan

⁸ Rini Astriani: *Pelaksanaan Akad Murabahah bil Wakalh dalm Produk Pembiayaan kepemilikan Emas Batangan di BRISyariah Cabang Bandung*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013)

⁹ Pitriya Ulpah: *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan Akad Murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Bandung*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

	Mulia di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung	Mulia	yaitu terdapat akad <i>murabahah bil wakalah</i> .
2	Pelaksanaan Akad Murabahah bil Wakalah dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Batangan di BRISyariah Cabang Bandung.	Membahasa mengenai Produk Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia	Berbeda lokasi penelitian, serta akad yang digunakan yaitu terdapat akad <i>murabahah bil wakalah</i> , dan pada sekripsi tersebut juga membehasa mengenai penyerahan obyek pembiayaan (emas) yang tidak diserahkan secara langsung atau tunai.
3	Tinjaun Yuridis Normatif Terhadap Pelaksanaan	Membahasa mengenai Produk Pembiayaan Kepemilikan Logam	Berbeda lokasi penelitian, serta akad yang digunakan

Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan Akad Murabahah di BJB Syria Kantor Pusat Bandung	Mulia	yaitu terdapat akad <i>murabahah</i> dan ketentuan pengenaan biaya ujarh yang tidak sesuai dengan SEBI No. 14/16/DPbs perihal PKE.
--	-------	---

F. Kerangka Pemikiran

Salah satu prinsip bermuamalah adalah *'an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka wujud dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad.¹⁰ Akad secara umum adalah pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.

Menurut bahasa *'Aqad* mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah: mengikat (الربط), Sambungan (عقدة), Janji (العهد)¹¹

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

¹⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Cet ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 45.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-9, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm 44.

Artinya: Ya, siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa.

Akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹² Akad merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian dan begitu pula dengan objek yang diperjanjikannya dan didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Dalam bermuamalah terdapat akad/perjanjian yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak. Al-qur'an mengenai akad dalam surat al-Maidah (5) ayat 1 sebagai berikut:¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihallakan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kegendaki.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet ke-2, (PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 49

¹³ Imam G. Masykur, dkk., *Almumayyaz: Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,t.t), hlm 106.

Dalam hadits dijelaskan mengenai akad yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْنَ الْخِيَارِ. (أخرجه البخارى ومسلم)

Artinya: Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu 'alaihi wasallam bersabda : “Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.” (HR Bukhori dan Muslim).¹⁴

Di Indonesia akad dikenal dengan istilah “*Perjanjian*” yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1313 yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁵

Akad memiliki tahapan-tahapan atau yang harus dipenuhi yaitu: pertama, perjanjian (*'ahdu*); kedua, persetujuan dua pihak atau lebih, dan ketiga, perikatan (*aqdu*). Setelah adanya akad antara dua orang atau lebih, maka akan timbul bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad. Sahnya suatu akad menurut

¹⁴ Diah Ayu Lestari, *Maklah Hdits tentang Akad dalam Syariah*, <http://diyah5888.blogspot.com/2017/11/makalah-hadis-tentang-akad-dalam-syariah.html>, (diakses 8 Desember 2019)

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hukum Islam ditentukan terpenuhinya rukun akad. Rukun akad adalah sesuatu yang harus ada dalam akad.¹⁶ Rukun dan syarat akad diantaranya adalah:

- a. Orang yang berakad (*aqid*), contoh: penjual dan pembeli;
- b. Sesuatu yang diadakan (*ma'qud alaih*), contoh: harga atau yang dihargakan;
- c. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.¹⁷

Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Akid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, *aqid* (orang yang berakad) disyaratkan mempunyai kemampuan (*alayah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad.¹⁸
- b. *Ma'uqud 'alaih* (objek akad), disyaratkan:
 - a) Sesuatu yang diadakan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tiak ada, seperti jual beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para fuqaha' mengecualikan akad ini untuk akad *salam*, *ijarah*, *hibah*, dan *istishna'*, meskipun barangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ...hlm 45.

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-10, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 45.

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*...hlm 47.

- b) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, tidak najis atau benda *mutanajis* (benda yang bercampur najis). Tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama (*mal ghairu mutaqawwim*), seperti jual beli darah, narkoba, dan lain sebagainya.
- c) Objek akad dapat diserahterimakan ketika akad. Apabila barang tidak dapat diserahterimakan ketika akad, maka akadnya batal, seperti jual beli burung diudara.
- d) Objek yang diadakan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. caranya dapat dilakukan dengan menunjukan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik barang. Keharusan mengetahui objek yang diadakan menurut para fuqaha' adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad.¹⁹
- c. *Shigat akad*, merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad.
- Shigat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan yang menunjukan kerelaan yang terjadi lebih awal dari salah seorang yang berakad. perkataan yang pertama dalam jual beli pun dinamakan *ijab*, baik berasal dari penjual maupun dari pembeli. Bila penjual mengawali dengan perkataan “saya jual” dinamakan *ijab*, atau pembeli yang mengawali dengan perkataan “saya beli” juga dinamakan dengan *ijab*. Sementara *qabul* adalah sesuatu yang

¹⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* ...hlm 50.

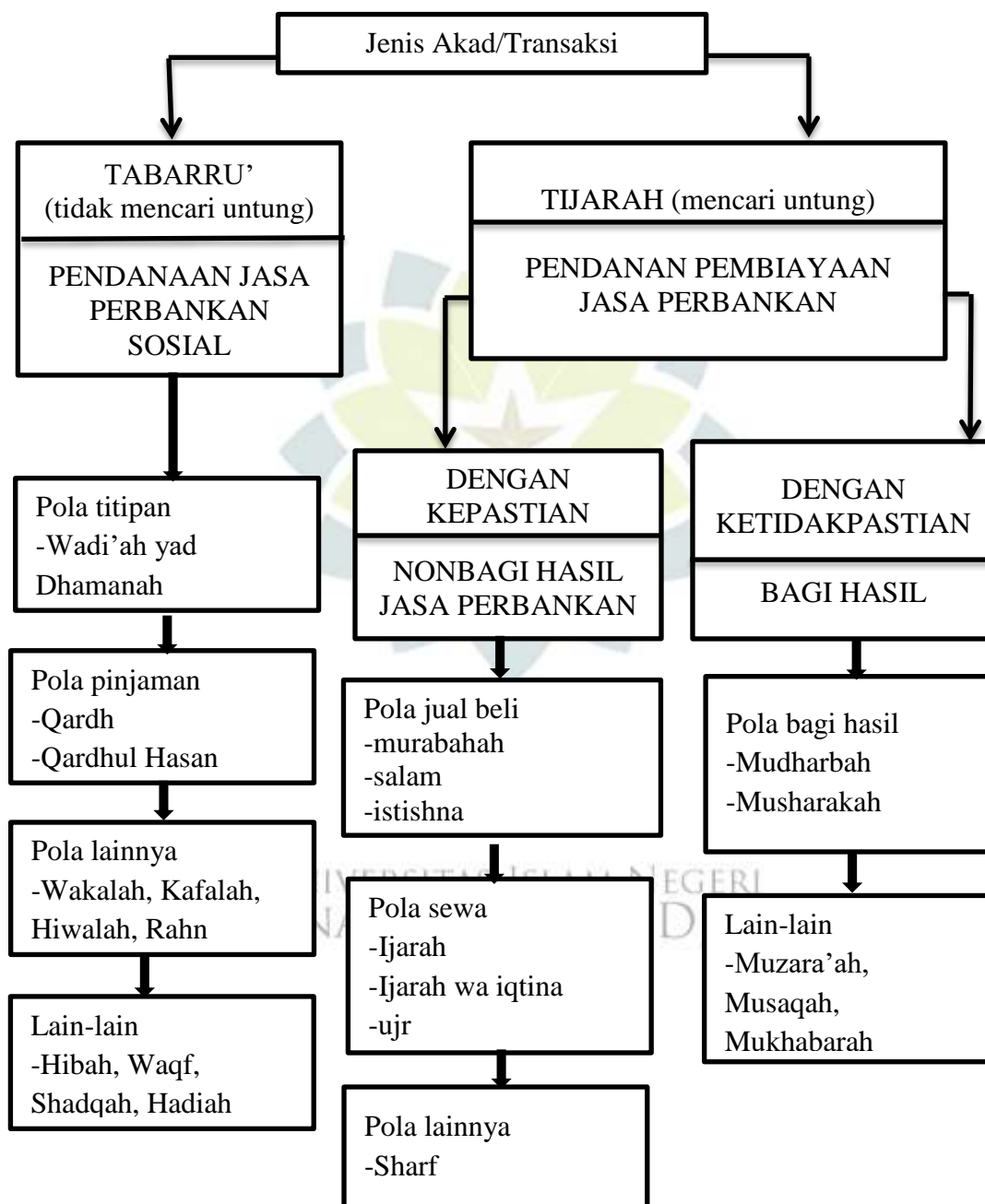
disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang berakad menunjukan kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban dari ucapan pertama. Kabul adakalanya berasal dari penjual dan adakalanya juga dari pembeli ketika akad berlangsung, misalnya dengan kalimat saya terima.

Ijab dan *qabul* disyaratkan:

- 1) Jelas menunjukan *ijab* dan *qabul*, artinya masing-masing dari *ijab* dan *qabul* jelas menunjukan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad.
 - 2) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Kesesuaian itu dikembalikan kepada setiap yang diakadkan. Bila seseorang mengatakan jual, jawabannya adalah beli atau sejenisnya. bila terjadi perbedaan antara *ijab* dengan *qabul*, akad tidak sah
 - 3) Bersambungan antara *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan. Atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir dengan adanya *ijab*.
- Untuk terciptanya bersambungan antara *ijab* dan *qabul* disyaratkan:
- a) Bersatunya *majelis* (tempat) *ijab* dan *qabul*
 - b) *Ijab* tidak ditarik kembali sebelum ada *qabul* dari pihak lain.²⁰

²⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* ...hlm 51-52

Akad terbagi menjadi dua yakni akad *tabarru'* dan *tijarah/mua'wadah*.²¹



²¹ Adiwarnaman Karim, *Bank Islam: Analisi Fiqih dan Keuangan...*, hlm 66

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah, khususnya di Indonesia, maka produk-produk ekonomi syariah pun berkembang secara dinamis. Akad-akad dalam transaksi syariah pun mengalami berbagai inovasi dari beberapa akad yang ada dalam konsep fikih muamalah yang telah ada selama ini. Salah satu inovasi tersebut adalah lahirnya konsep multiakad dalam suatu transaksi. Transaksi dengan bentuk multiakad ini hampir ada dalam semua produk syariah saat ini.²² Seperti penggunaan akad *qardh* dan akad *ijarah* dalam pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Suniaraja Bandung.

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih salaf ash shalih, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwul* atau akad yang saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.²³

Kemudian akad selanjutnya yang digunakan dalam produk pembiayaan kepemilikan logam mulia di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Suniaraja Bandung yaitu akad *ijarah*. *Ijarah* atau sewa berasal dari kata *al-ajru* artinya ganti, upah atau menjual manfaat'. Secara istilah sewa (*ijarah*) adalah akad untuk mengambil manfaat

²² Hasanudin Maulana: *Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Vol. III, No.1, Januari 2011, hlm 155.

²³ Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 58.

yang dibatasi oleh waktu tertentu dengan harga tertentu.²⁴ *Al-ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits ataupun ijma ulama. Namun demikian terdapat ulama yang tidak membolehkannya, di antaranya Abu Bakar al-Ashamm, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Basri dan lainnya. Dengan alasan, jika kita gunakan *qiyas* (analog), akad al-ijarah identik dengan *bai' al ma'dum* yang dilarang, manfaat sebagai objek tidak bisa dihadirkan ketika akad. Akan tetapi, pendapat ini disanggah Ibnu Rusyd dengan mengatakan bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad, namun akan bias dipenuhi ketika akad telah berjalan.²⁵

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²⁶ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang disarankan untuk memberikan gejala-gejala secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, Cet ke-2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, hlm 185.

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah...* hlm 153-154.

²⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Cet ke-9, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm 43.

populasi atau daerah tertentu.²⁷ Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁸ Sebagaimana dengan namanya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.²⁹

Melalui metode ini penulis dapat menggambarkan ataupun mendeskripsikan secara tepat mengenai pelaksanaan pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia di Bank BRISyariah Kantor Cabang Suniaraja Bandung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BRISyariah Kantor Cabang Suniaraja Bandung, Jl. Suniaraja No.82, Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁷ Nurul Zuriyah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cet ke-3 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm 47.

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet ke-8, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm 63.

²⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Cet ke-7, (Bandung, PT. Remaja Rosdakara, 2008), hlm 35.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan staff BRI Syariah Kantor Cabang Suniaraja Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku sebagai literatur dalam proses penyusunan penelitian ini, selain itu juga penulis menambahkan referensi lain yaitu berupa makalah, skripsi, dan jurnal, yang dapat membantu dalam proses penyusunan penelitian ini.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber.³⁰

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini peneliti berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan oleh subjek penelitian,³¹ yang kemudian penulis berusaha untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan. Oleh sebab itu peneliti berusaha untuk menjelaskan:

1. Alasan penggunaan akad *qardh* dan *ijarah* dalam pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KPL).

³⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 54

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-1, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm 82.

2. Mengambarkan mekanisme penggunaan akad *qard* dan *ijarah* dalam pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KPL).
3. Menggambarkan relevansi ataupun kesesuaian penggunaan akad *qard* dan *ijarah* dengan Fatwa No.77/DSN'MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan SEBI No.14/16/Dpbs/2012 tentang Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KPL) dilihat dari perspektif fiqh muamalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Sehingga observer berada bersama obyek yang diselidiknya. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.³² Instrumen yang digunakan dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.³³

³² Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial... hlm 100.

³³ Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Cet ke-12 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 51.

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi secara langsung yaitu penulis langsung ketempat terjadinya gejala ataupun peristiwa dengan mendatangi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Suniaraja Bandung.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape Recorder).³⁴ Teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*informal conversational interview*), 2) wawancara umum yang terarah (*general interview guide approach*), dan 3) wawancara terbuka yang standar (*standardized open-ended interview*).

Melalui wawancara ini penulis akan mencoba melakukan wawancara terstruktur agar pertanyaan yang diajukan sesuai dengan fokus permasalahan yang dalam penelitian ini.

Wawancara akan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mengenai pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KLM) kepada staff di BRI Syariah Kantor Cabang Suniaraja Bandung.

³⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial...* hlm 67.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*Book Survey*) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian.

Untuk penelitian penulis mengumpulkan data melalui buku-buku mengenai fiqh ekonomi syariah, bank syariah, skripsi-skripsi terdahulu, dan lain sebagainya.

d. Analisi Data

Langkah terakhir yang ditempuh penulis dalam langkah-langkah penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan data, dari teknik pengumpulan data yang telah ditempuh oleh penulis maka penulis mengumpulkan data-data tersebut agar menjadi satu-kesatuan yang utuh.
- b. Menyeleksi data, dengan mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat
- c. Menganalisis data, dengan menghubungkan anatar teori yang telah disusun dalam kajian teori dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.
- d. Menyimpulkan, membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh dan juga yang telah dianalisis.